

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan isu global dalam hubungan internasional mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam beberapa dekade ini. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari perubahan isu yang dulunya masuk kedalam *low politic issues* kemudian berkembang menjadi *high politic issues*. Salah satu isu yang dimaksud disini adalah isu lingkungan. Isu lingkungan sebelumnya merupakan isu yang spesifik dan memiliki ruang lingkup yang terbatas. Namun kini isu lingkungan telah menjadi isu yang lebih luas baik dari akar penyebab maupun kebijakan yang diambil pun masuk dalam skala` global (Goodin,1992:4;Suharko,1998:43).

Masuknya isu lingkungan menjadi isu global dalam hubungan internasional dapat disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan sosial manusia yang bergerak secara masif (Sorensen dan Jackson,1999:323). Alasan masuknya isu lingkungan ke dalam isu global menurut Owen Greene *Pertama*, persoalan lingkungan hidup secara *inherent* berada dalam lingkup global. Contohnya seperti gas CFCs (cholorofluorocarbons) yang dilepaskan ke udara secara masif memberikan kontribusi dalam penipisan ozon dan perubahan iklim. *Kedua*, beberapa persoalan lingkungan berhubungan dengan pengeksploitasi *global commons* seperti: sumber-sumber yang dieskplotasi semua anggota komunitas

internasional termasuk di dalamnya laut, atmosfer, dan ruang angkasa. *Ketiga*, persoalan lingkungan secara intrinsik bersifat transnasional atau secara ilmiah persoalan lingkungan dapat menembus batas negara meskipun terkadang tidak sampai secara global. *Keempat*, banyak proses eksploitasi secara berlebihan atau degradasi lingkungan secara relatif menjadi persoalan dalam skala lokal ataupun nasional, sekarang ini telah dianggap sebagai persoalan global (Greene,2005: 452-453;Winarno,2011:157).

Penyebab krisis lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim disebabkan oleh efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, degradasi dan hilangnya tanah pertanian yang subur, degradasi dan penggundulan hutan, pengurangan dan polusi suplai air bersih, dan penipisan daerah tangkapan ikan. Keenam sumber tersebut disertai dengan pertumbuhan penduduk dan distribusi sumberdaya yang tidak merata menimbulkan kelangkaan yang disebut *environmental scarcity* atau kelangkaan lingkungan (Berger;Swedberg & Smelser,1994; Suharko,1998:43).

Semakin kompleksnya isu lingkungan tadi menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi setiap individu maupun kelompok tertentu untuk menyelesaikannya. Keterlibatan negara dan aktor selain negara dalam masalah lingkungan seperti pada konferensi internasional mengenai *Biodiversity* atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi yang diselenggarakan di Brazil pada tahun 1992. Konferensi yang dihadiri oleh 150 negara tersebut telah menyepakati kode etik dalam memperlakukan lingkungan, sehingga kerusakan bumi tidak menjadi semakin parah (Suharko,1998:44).

Kapasitas yang dimiliki oleh negara sebagai aktor utama dalam menyelesaikan masalah lingkungan, nampaknya masih kurang optimal. Karena isu lingkungan sama halnya dengan isu –isu kontemporer lainnya yang banyak melibatkan aktor dan kepentingan di dalamnya(Winarno,2011:145). Kepentingan-kepentingan politik seperti dalam mengkomersilkan kawasan hutan lindung dalam rangka pembangunan ekonomi dan industri. Keterbatasan yang dimiliki negara dalam menangani dan mengelola permasalahan yang ada, pada akhirnya melahirkan aktor serta lembaga-lembaga baru untuk melibatkan diri dalam hubungan internasional.

Aktor-aktor baru ini kemudian dikenal dengan sebutan *civil society organization* (CSO). Civil society merupakan sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen (Gaffar,1999:180). Organisasi non-pemerintah (NGO) atau biasa dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu aktor yang termasuk dalam sebutan *civil society*. NGO memiliki lingkup kerja yang bersifat kelompok mandiri dan memiliki kepedulian terhadap persoalan tertentu sehingga mereka memiliki karakter tersendiri. Seperti peduli dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. NGO sendiri secara harfiah merupakan organisasi yang dibentuk oleh suatu kalangan tertentu dan bersifat independen. Tidak bergantung pada pemerintah atau negara dalam masalah finansial dan sarana prasarna (Gaffar,1999:200).

World Wide Fund for Nature atau bisa disingkat dengan WWF merupakan organisasi non-pemerintah atau NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan

hidup dan fokus kerjanya terhadap konservasi, penelitian dan restorasi pelestarian lingkungan. WWF resmi berdiri sebagai organisasi internasional pada tahun 1961 dengan slogan utamanya “*WWF for a Living Planet*”. Dalam memperkuat *bargaining position* sebagai NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup, WWF mulai membangun mitra kerjasama dengan beberapa organisasi internasional, seperti badan-badan di PBB sejak tahun 1990an.

Tepat setelah setahun resmi berdiri, WWF memilih Indonesia sebagai salah satu negara tujuannya dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati (*biodiversity*) terbesar di dunia yang masih asri. Indonesia juga menjadi rumah bagi hewan dan tumbuhan endemik khas hutan hujan tropis terkaya di dunia. Namun secara bersamaan Indonesia yang sedang berproses menuju pembangunan yang berkeadilan ternyata tidak lepas dari masalah lingkungan hidup.

Penyumbang kerusakan lingkungan hidup terbesar terjadi pada sektor kehutanan. Dengan luas hutan sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia menurut data: Buku statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012 (Laporan Statistik Kehutanan Indonesia 2011/2012) setiap harinya terus mengalami penyusutan akibat pemanfaatan hutan dan pembalakan liar yang tak terkendali. Deforestasi hutan di Indonesia telah mencapai 610.375,92 Ha pada tahun 2011 (WWF Indonesia, www.wwf.or.id). Sedangkan pada tahun 2012 diperkirakan laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 840.000 Ha dalam jurnal *Nature Climate Change*. Namun

hasil tersebut kemudian dibantah oleh pihak kementerian kehutanan yang mengatakan bahwa jumlah tersebut terlalu besar karena menurut data Indonesia setiap tahunnya mengalami deforestasi hutan hanya sekitar 450.000 Ha (Deforestasi Indonesia Kalahkan Brazil, www.bbc.com).

Kawasan hutan di wilayah Sumatra dan Kalimantan merupakan areal deforestasi hutan terbesar di Indonesia. Hutan Sumatra dan Kalimantan setidaknya telah menyumbang 80% deforestasi global. Menurut laporan WWF dalam *Living Forest Report* menyebutkan bahwa lebih dari 170 juta hektar hutan akan diperkirakan hilang sepanjang 2010-2030 apabila deforestasi tidak dihentikan (Hutan Sumatra dan Kalimantan Sumbang Deforestasi Global, www.bbc.com). Deforestasi telah mengakibatkan hilang atau rusaknya ekosistem hutan dan sampai terancamnya habitat asli hewan serta tumbuhan.

Orang Utan (*Pongo Pygmeus*) adalah salah satu hewan endemik hutan hujan tropis yang terancam keberlangsungan hidupnya. Mereka yang memiliki habitat asli di kawasan Kalimantan dan Sumatra diperkirakan saat ini hanya tersisa 30.000-40.000 individu yang hidup di alam liar. Sedangkan populasi terbanyak berada di Kalimantan Tengah dengan populasi sebanyak 35.000 individu (Pegiat Lingkungan Perkirakan Banyak Orangutan yang Mati Akibat Kebakaran Hutan, www.nationalgeographic.co.id). Mereka yang sepenuhnya hidup berdampingan dengan alam harus rela kehilangan habitat aslinya akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Semakin gencarnya ekspansi untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta terhadap hutan semakin menambah lajunya deforestasi hutan di Indonesia. Perusahaan swasta asal Singapura Indofood Agri Resources dan Bumitama Agri melakukan penebangan hutan di Kalimantan Timur dan Tengah sampai pada kategori *high conservation value forest* dan mengakibatkan sejumlah bayi orangutan dievakuasi dari kawasan tersebut (Korporasi Asing Terus Lakukan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia oleh Aji Wihardandi, www.mongabay.co.id). Sehingga perlu adanya langkah strategi cepat untuk menekan lajunya deforestasi hutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konservasi.

Konservasi secara harfiah dalam kamus bahasa Indonesia bermakna pada pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu untuk mencegah kerusakan. Sedangkan konservasi dalam arti sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya (Pengertian Konservasi, kbbi.web.id/konservasi).

WWF merupakan NGO lingkungan yang menerapkan konservasi sebagai salah satu fokus dan jalan mereka dalam menanggulangi masalah lingkungan di Indonesia. Walaupun pada awalnya WWF lebih berfokus terhadap perlindungan spesies langka yaitu dengan melakukan konservasi terhadap Badak Jawa di Ujung Kulon (WWF Indonesia, www.wwf.or.id). Akan tetapi seiring berjalannya waktu pandangan konservasi yang dianut oleh WWF mengalami perkembangan yang lebih terpadu dan holistik yaitu dengan menggabungkan aspek konservasi dan

pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (*Integrated Conservation and Development Project* or ICDP) (Rufendi,2012:10). Pengembangan ICDP diterapkan di beberapa kawasan konservasi seperti di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Pada prinsipnya dalam melakukan konservasi lingkungan WWF menerapkan pengembangan pemberdayaan komunitas atau kelompok masyarakat atau *Community Empowerment Working Group* (CEWG) dengan pola pengelolaan kolaboratif bersama pemerintah dan para *stakeholder*. CWEG yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya alam sekitar secara berkelanjutan. Dengan pemetaan partisiptif atas lokasi yang bernilai ekologis, sosial, kultural dan spritual bagi masyarakat.

Dalam basis program kerjanya WWF menggunakan *Communication and Outreach* (pendidikan konservasi) sebagai upaya sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat dalam bidang pendindikan. Pendidikan secara langsung kepada para pendidik, baik di tingkat taman kanak-kanak hingga kelompok muda dan masyarakat setempat untuk lebih memahami tentang lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk sistem kerja lainnya WWF menggunakan *Community Empowerment, Collaborative Management, dan Field Based Conservation* .

“*Sebangau Conservation Project*” adalah salah satu program yang dibuat oleh WWF dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang semakin rusak akibat pembalakan liar dan kebakaran hutan di kawasan Kalimantan Tengah. WWF

memilih TNS sebagai tempat konservasi karena TNS merupakan salah satu perwakilan hamparan kawasan hutan rawa gambut dengan kondisi yang masih relatif baik, dan TNS menjadi tempat penyedia *supply* air bagi masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rumah habitat Orangutan dan keanekaragaman hayati. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Leader Program WWF Kalimantan Tengah Rosenda Ch Kasih bahwa “TNS merupakan satu-satunya lahan rawa gambut terbaik yang saat ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia sehingga harus dijaga kelestariannya”(Selamatkan hutan TN Sebangau, oleh Ahmad Wijaya, www.antaraneews.com).

Program SCP yang dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) ini dulunya merupakan areal hutan gambut dan menjadi lokasi operasi 13 hak pengusaha hutan (HPH) di tahun 1970 hingga pertengahan tahun 1990an. Setelah perusahaan tersebut berhenti beroperasi, kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat lokal semakin bertambah. Karena sebagian besar mereka bergantung mata pencahariannya pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Ditambah dengan ketidakjelasan pemerintah dalam pengelolaan dan batas area kawasan hutan yang dilindungi dan area yang dapat dimanfaatkan.

Terdapat 150 pengusaha pengolah kayu yang melakukan *illegal logging* menyebabkan 66 ribu Ha kayu hilang(Selamatkan hutan TN Sebangau oleh Ahmad Wijaya, www.antaraneews.com/). Tim gabungan dari BKSDA Kalteng dan Tim Penanganan Ilegal Logging Provinsi Kalteng pada tahun 2006 menemukan 578.360 kayu hasil pembakalan liar. Bahkan kegiatan tersebut semakin meluas hingga masuk ke dalam kawasan hutan dan jauh dari pemukiman penduduk

menurut Kepala BKSDA Kalteng Mega Heriyanto (Pembalakan Liar Kembali Terjadi di Taman Nasional Sebangau, www.tempo.com).

Penebangan hutan dalam jumlah yang besar dan pengambilan kayu dengan cara menggali parit atau kanal telah merusak aliran arus air yang masuk ke dalam kawasan Hutan Rawa Gambut Sebangau. Hal ini mengakibatkan ancaman serius terhadap ekosistem di kawasan tersebut. Tingkat degradasi ekosistem TNS menyisakan 66 ribu Ha lahan kritis untuk ditanam kembali (Kebakaran Hutan Di Area Penanaman Newtress di Sebangau, Kalimantan Tengah, www.pasindonesia.org). Proses penggalian kanal membuat HRGS kehilangan fungsi hidrologisnya dan asupan pengairan serta mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau. Kekeringan tersebut menyebabkan HRGS mudah terbakar dan selalu menjadi areal titik panas (*hot spot*) selama musim kemarau. Dari tahun 1992-2000 areal HRGS selalu dilanda kebakaran hutan. Kebakaran hutan parah pernah terjadi pada tahun 2007 dan 2009 yang mana diperkirakan sekitar 20 Ha di wilayah Pulang Pisau, 600 Ha di Mendawai, dan 20 Ha di wilayah Palangkaraya (Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah Butuh Penanganan Serius oleh Massayu Yulien Vinanda dan Tira Maya, www.wwf.or.id). Ditambah dengan tingkat kesadaran masyarakat lokal yang masih rendah untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan mematuhi peraturan yang melarang mereka untuk menebang pohon secara ilegal.

Melihat probelmatika lingkungan yang terjadi di HRGS, WWF bersama para stakeholder mengajukan HRGS menjadi kawasan Taman Nasional. HRGS memiliki potensi yang bernilai ekologis sebagai tempat penyimpanan karbon dan

tata air. Selain itu HRGS merupakan hutan rawa gambut yang masih asri diantara 16-27 juta Ha yang masih tersisa di Indonesia. Akhirnya pada tahun 2004 dikeluarkan Keputusan Kementrian Kehutanan yang menetapkan HRGS menjadi Taman Nasional Sebangau, sekaligus menandakannya sebagai Taman Nasional termuda di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tadi, dapat ditarik rumusan masalah yaitu: “ Bagaimana peran WWF dalam konservasi lingkungan di Taman Nasional Sebangau “?

C. Kerangka Analisa

Kehadiran NGO sebagai aktor baru dalam hubungan internasional dewasa ini menjadi pertimbangan karena peran mereka yang cukup signifikan dibanding negara. Dimana peran negara dalam menangani masalah lingkungan memiliki keterbatasan dalam kapasitasnya. Sehingga isu-isu lingkungan kemudian sedikit dilewatkan demi tercapainya pemeratan pembangunan ekonomi. Seperti di Indonesia contohnya demi pembangunan nasional, pemerintah membuka sektor-sektor industri seperti perusahaan yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini kemudian menjadikan beberapa NGO lingkungan seperti WWF tergerak untuk berperan dalam melindungi dan merestorasi lingkungan Indonesia yang memiliki potensi alam yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Peran perdana WWF dengan melakukan penelitian terhadap penyelamatan populasi badak Jawa di Ujung Kulon menjadi penanda

atau *start point* WWF untuk berkomitment menangani masalah lingkungan di Indonesia. Dan dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah penulis menggunakan konsep peranan NGO menurut Noeleen Heyzer, dan Philip Eldridge, serta pendekatan *deep ecology* menurut Arne Naess. Dari konsep peranan NGO kedua pemikir tersebut memiliki sudut pandang yang hampir sama dalam melihat bagaimana peran dari NGO di Indonesia. Sedangkan melalui pendekatan *deep ecology* dapat melihat bagaimana landasan utama yang ingin diterapkan oleh NGO lingkungan dalam melakukan perubahan terhadap lingkungan hidup saat ini.

1. Konsep Peranan NGO

Dalam bukunya yang berjudul “Politik Indonesia : Menuju Transisi Demokrasi” Affan Gaffar menjelaskan bahwa NGO atau LSM merupakan aktor “The Best Provider” atau agen penyedia terbaik. Karena sebagian besar agenda dan kegiatan pelayanan mereka lebih efisien dan efektif daripada kegiatan yang disediakan oleh pemerintah (Gaffar,1999:202). Selain itu NGO memiliki kedekatan secara emosional dengan masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah (*grass-roots*) sehingga lebih dipercaya ketimbang aparaturnegara yang lebih hierarkis dan arogansi (Gaffar,1999:203). Seperti menurut Noeleen Heyzer dalam Gaffar (1999:203) turut menjelaskan bahwa NGO memiliki peranan penting dalam proses pembangunan negara. Heyzer membaginya menjadi 3 kategori atau tipologi sebagai berikut:

- a. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga- lembaga internasional lainnya.
- c. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Dalam hal ini secara tidak langsung Heyzer mencoba mengelompokkan peranan NGO menjadi dua kelompok. Pertama, bahwa peranan NGO dalam non-politik dengan metode pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial. Kedua, peranan NGO dalam politik sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah. Kelompok pertama tadi sama halnya dengan yang dilakukan oleh WWF di beberapa kawasan taman nasional dengan menerapkan program dan proyek lapangan yang disebut *Community Empowerment Working Group* (CEWG). CWEG merupakan kelompok kerja yang bertujuan secara lebih sistematis dan analitis untuk membahas, mengembangkan dan memajukan kegiatan keterlibatan peranan masyarakat lokal dalam agenda konservasi. Contohnya seperti program ekowisata di Taman Nasional Sebangau. Kegiatan ini merupakan program kerjasama WWF dan Balai Taman Nasional Sebangau dengan konsep pembangunan ekowisata yang berbasis pada masyarakat mandiri (*Community Based Ecotourism Development*).

Sedangkan di Indonesia NGO dapat dilihat dari hubungan NGO dan negara, dimensi atau orientasi mereka dalam melakukan kegiatan. Dalam hal ini Philip Eldridge dalam Gaffar (1999:212) membaginya menjadi 3 model NGO:

a. High level patnership: grassroots development

NGO yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang yang bersifat advokasi. Kelompok ini kurang memiliki minat pada hal-hal yang bersifat politis. Namun mempengaruhi perhatian yang sangat besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. NGO seperti ini umumnya tidak terlalu besar dan banyak yang bersifat lokal. Tidak jarang mereka terlibat dalam kegiatan yang besar dan selalu memelihara dukungan pada tingkat *grassroots*.

b. High level politic: grassroorts mobilization

NGO yang masuk dalam kategori ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan mereka tidak jarang berhubungan dengan usaha untuk mendukung "peningkatan kesadaran politik" masyarakat. Mereka pada umumnya tidak begitu saja dapat bekerja sama dengan pemerintah, sekalipun ada juga diantaranya telah mendapat proyek-proyek penelitian dari pemerintah. NGO ini bersifat advokatif terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapta tempat dalam kehidupan politik.

c. Empowerment at the grassroots

NGO ini cenderung memusatkan perhatiannya pada usaha untuk memberdayakan masyarakat terutama pada tingkat grassroots. Mereka tidak terlalu berminat mengadakan kontak dengan pemerintah. Mereka juga jarang memusatkan perhatian dan energinya untuk mengadakan kampanye guna mencapai perubahan. Mereka percaya bahwa perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah. Dan mereka tidak ingin terlibat dalam kegiatan yang berskala besar.

WWF merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan fokus utamanya adalah kegiatan konservasi, penelitian, restorasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Masuknya WWF di Indonesia telah disambut baik oleh pemerintah setempat dengan melakukan penelitian di Ujung Kulon pada tahun 1962 dengan objek penelitian terhadap populasi badak jawa yang hampir punah. Hingga kini hampir 50 tahun WWF bekerja dalam menangani masalah lingkungannya di Indonesia. Terbukti sampai saat ini basis kerja WWF yang lebih banyak bekerja di kawasan Taman Nasional dari Sabang hingga Merauke. Kerjasama yang dilakukan oleh WWF dan pemerintah (*partner of government*) tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada 13 Maret 1998 dengan Departemen Kehutanan Indonesia. Setelah pengesahan tersebut proyek dan program WWF bernilai ratusan juta rupiah tersebar di beberapa lokasi lingkungan di Indonesia. Komitmen WWF terus berlanjut dimana mereka salah satunya dengan mendukung Taman Nasional Sebangau sebagai areal konservasi.

2. Deep Ecology

Deep ecology merupakan sebuah istilah atau kata lain dari teori ekosentrisme. Teori ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Istilah *deep ecology* pertama kali dikemukakan oleh Arne Naess dalam artikelnya yang berjudul “ The Shallow and the Deep, Long-range Ecological Movement: A Summary” (Keraf:2010:93). Dalam artikel tersebut Naess menjelaskan bahwa *deep ecology* (DE) adalah suatu etika baru yang tidak hanya bersumber dan berpusat pada manusia, tetapi juga berpusat pada makhluk hidup seluruhnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Manusia dituntut untuk menghargai dan menghormati benda-benda non hayati, karena semua benda di alam semesta mempunyai “hak yang sama untuk berada, hidup dan berkembang”.

Etika baru yang dimaksud oleh DE tidak akan mengubah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukanlah sebagai pusat dari dunia moral. Tapi bagi DE lebih baik memusatkan perhatian kepada semua spesies termasuk spesies bukan manusia. DE berusaha mementingkan perhatian pada kepentingan seluruh komunitas ekologis.

Dalam permasalahan lingkungan DE melihat dari suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. Secara holistik maksudnya adalah pendekatan yang bersifat secara menyeluruh tidak hanya dalam relasi sebab dan akibat yang linear tapi sebagai sebuah jaringan yang kompleks (Keraf: 2010:343).

Selain itu bagi DE permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus dipahami secara komperhensif dan menjadikan aspek sosial juga manusia sebagai perhatian utama.

Kemudian untuk masalah etika yang dibangun di dalam DE merupakan sebuah etika praktis yang dapat menjadi sebuah gerakan. Maksudnya dapat menjadi sebuah gerakan adalah bahwa prinsip-prinsip moral etika lingkungan hidup harus diimplematasikan secara nyata dan konkret. Dalam hal ini DE lebih tepatnya disebut sebagai gerakan orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan bersama-sama memperjuangkan isu lingkungan hidup dan politik.

Suatu gerakan kelompok yang menuntut dan berdasarkan pada perubahan paradigma secara revolusioner, yaitu mulai dari cara pandang, mental, sikap, nilai, dan perilaku atau gaya hidup sebagai individu maupun kelompok. Perilaku gaya hidup yang di rumuskan oleh Naess dalam DE adalah “sederhana dalam sarana tapi kaya akan tujuan “ (*simple in means but rich in ends*). Suatu gaya hidup yang sederhana tetapi mengutamakan nilai yang memperkaya hidup. Dengan kualitas kehidupan yang bahagia dan bukan standar kehidupan apalagi standar material.

Disamping itu DE memiliki beberapa prinsip mengenai gerakan lingkungan hidup diantara adalah *Biospheric Egalitarianism*, *Non-antroposentrism*, *Self Realization* (realisasi diri), Hubungan simboisis, dan *From Having More to Being More*. Prinsip *Biospheric Egalitarianism* adalah pengakuan bahwa semua makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dari

suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. *Non-antroposentrism* menjelaskan pada manusia merupakan bagian dari alam, bukan di atas atau terpisah dari alam. Manusia bukan majikan alam semesta, tetapi sama statusnya sebagai ciptaan Tuhan. Sedangkan *Self Realization* (realisasi diri) menekankan bahwa manusia merealisasikan dirinya dengan mengembangkan potensi diri. Hanya dengan itu manusia dapat mempertahankan hidupnya. DE memahami bahwa manusia sebagai makhluk ekologis (*egological animal*). Realisasi manusia berlangsung dalam komunitas ekologis.

Manusia berkembang menjadi manusia yang penuh dan utuh justru dalam relasi dengan semua kenyataan kehidupan dalam alam. Lainnya hal dengan prinsip hubungan simbiosis dalam prinsip ini menekankan pada hidup bersama secara saling menguntungkan. Setiap bentuk kehidupan termasuk dan menjadi bagian komunitas ekologis seluruhnya, dimana keberadaan yang satu menunjang keberadaan yang lain. Keanekaragaman dalam alam harus dipertahankan karena akan mempertahankan kelangsungan ekosistem itu sendiri.

Prinsip “ hidup dan biarkan hidup “ (*live and let live*) adalah prinsip utama yang terkait dengan pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Terakhir prinsip *FROM HAVING MORE TO BEING MORE* menjelaskan bahwa perlu adanya perubahan dalam politik dengan *ecopolitic*. Dalam kerangka *ecopolitic* perubahan bukan hanya melibatkan individu melainkan juga membutuhkan transformasi kultural dan politis yang mempengaruhi dan menyeluruh struktur dasar, ekonomi dan ideologis. Meninggalkan konsep

pembangunan berkelanjutan diganti dengan konsep “ keberlanjutan ekologis luas” (*wide ecological sustainability*).

Gerakan lingkungan yang diyakini oleh DE adalah gerakan lingkungan yang dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan secara nyata dan langsung kepada akar permasalahannya. Sedangkan bagi WWF dalam menaggulangi permasalahan lingkungan melalui prinsip konservasi yang berbasis pada pemberdayaan dan pendidikan terhadap masyarakat. Masyarakat diberikan pengetahuan tentang lingkungan, bagaimana menjaga dan melestraikannya serta dampak yang ditimbulkan apabila kita merusak lingkungan. Dalam pendidikan konservasi WWF membuat dengan menerbitkan buku cerita mengenai konservasi, *WWF goes to school*, dan media massa elektronik maupun cetak.

D. Hipotesa

Dengan menggunakan kerangka analisa tadi maka dalam menjawab rumusan masalah penulis akhirnya mengambil hipotesa. Peran WWF dalam konservasi lingkungan di Taman Nasional Sebangau *Pertama*, sebagai aktor non-negara yang memobilisasi masyarakat dan pemerintah dengan cara mendukung serta mendampingi melalui Sebangau Conservation Project demi terlindunginya kelestarian lingkungan hidup. *Kedua*, menerapkan prinsip menghormati dan menghargai alam kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya penyelamatan terhadap lingkungan hidup.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskripsi yang berusaha untuk menggambarkan kepada pembaca pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik yang dilakukan penulis dalam mencari referensi melalui studi kepustakaan, menggunakan dan memanfaatkan literature sehari-hari, buku-buku, koran, suart kabar, jurnal, majalah. Dilai itu pula penulis juga menggunakan internet atau media komputer sebagai pencarian referensi yang baik dan relevan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan WWF sebagai bagian dari *non-state government organization* (NGO) yang hadir sebagai aktor baru dalam hubungan internasional dan pengaruhnya terhadap masyarakat kelas bawah (*grassroots*).
- 2) Untuk memberikan informasi dan penjabaran mengenai peran WWF dalam melakukan konservasi lingkungan di Taman Nasioanal Sebangau melalui “Sebangau Conservationist Project”.
- 3) Untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan di semester, dan nantinya penelitian ini dapat di jadikan sebagai syarat dalam

memperoleh gelar sarjana Starta Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih mempermudah dalam penulisan skripsi dan menghindari ketidakfokusan dalam pembahasannya, penulis hanya berfokus pada peranan WWF dalam menanggulangi atau menangani masalah kerusakan lingkungan di Indonesia khususnya di kawasan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah melalui program kerja yang bernama Sebangau Conservation Project dari rentang waktu 2008-2015.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain adalah:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang alasan pemilihan judul peranan *world wide fund for nature* (WWF) dalam konservasi lingkungan di Indonesia studi kasus: *Sebangau Conservation Project* Taman Nasional Sebangau sebagai objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka analisa, hipotesa sementara yang diambil oleh penulis, metode penelitian, teknik pengambilan data, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang WWF sebagai NGO yang bergerak dalam konservasi lingkungan di Indonesia yang akan memuat kiprah WWF sebagai NGO lingkungan yang lebih terpadu dalam agenda konservasinya di beberapa Taman Nasional di Indonesia, kemudian membahas mengenai basis program kerja WWF di Indonesia, sistem kerja WWF di Indonesia, berlanjut pada profil mengenai Taman Nasional Sebangau, problematika lingkungan di kawasan Taman Nasional Sebangau sehingga WWF dapat berkiprah, terakhir dilanjutkan dengan bahasan mengenai tujuan dan program *sebangau conservation project* WWF di Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah.

BAB III : Berisi tentang peran WWF dalam konservasi lingkungan dengan mendukung dan mendampingi masyarakat di Taman Nasional Sebangau melalui pengelolaan kolaboratif bersama pemerintah lokal dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah.

BAB IV : Berisi tentang pendekatan yang dilakukan WWF dalam melakukan konservasi lingkungan di Taman Nasional Sebangau dengan prinsip *moral responsibility for nature* dan *caring to nature* kepada masyarakat dan pemerintah.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan terkait dengan bab yang sebelumnya dibahas.